

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula diskreasi daerah untuk menggunakan penghasilan asli daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Didalam asas desentralisasi, seiring dengan diserahkannya kewenangan daerah, pemerintah pusat harus menyerahkan pembiayaan, personalia dan perlengkapan (3P) sebagai syarat mutlak. Dengan kata lain, desentralisasi selalu dimaknai sebagai distribusi sumber daya dari pusat kepada daerah.

Menurut UU Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Jika dibandingkan dengan sektor bisnis

sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil sebab pendapatan tersebut diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan.

Menurut Mahmudi (2010) perubahan sistem penganggaran berupa penggunaan anggaran berbasis kinerja berimplikasi pada perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Penataan ulang kelembagaan pengelolaan keuangan daerah itu bukan saja untuk menyesuaikan sistem anggaran yang baru, tetapi juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan desentralisasi fiskal. Beberapa perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah tersebut antara lain: Perubahan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah dari sistem sentralisasi pada bagian keuangan sekretariat daerah menjadi sistem desentralisasi ke masing-masing satuan kerja. Dan digabungkannya fungsi pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah dengan fungsi pengendalian belanja yang dilakukan oleh biro/bagian keuangan dalam satu lembaga yaitu badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD).

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien dan akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Bastian (2006:274) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Jadi dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Ini juga berlaku untuk pemerintahan daerah yang bertindak sebagai sebuah organisasi untuk mengukur output apakah sudah bermanfaat.

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuat keputusan. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Ada beberapa aspek untuk mengukur kinerja suatu organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Salah satu aspeknya yaitu aspek finansial. Ketika diukur dalam aspek finansial maka ini akan berkaitan dengan laporan keuangan pemerintahan daerah. Laporan keuangan ini juga akan berkaitan dengan kemandirian dan kemampuan suatu daerah. Kemandirian suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah untuk membuat dan melaporkan hasil kerja keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga sangat berguna untuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas dapat digunakan untuk pelaku anggaran dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam bentuk laporan. Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan

pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Dengan menyajikan laporan keuangan dan dilakukan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan maka rencana untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan akan berjalan efektif.

Peggi Sande (2013) dalam penelitian skripsinya dengan judul “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*” menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan lainnya yaitu akseibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan dan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan akan memudahkan para praktisi akademik untuk bisa menilai kinerja pemerintahan daerah. Kinerja pemerintahan dalam hal ini dikhususkan dalam penilaian kinerja keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintahan daerah tiap tahunnya.

Penggunaan analisis keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan daerah belum banyak dilakukan, tidak seperti untuk sektor privat yang sudah sering dilakukan. Hal tersebut karena:

- a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintahan daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat privat

- b. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD.

Aspek pengukuran kinerja juga menjadi keharusan untuk provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah. Laporan keuangan yang bersifat akuntabilitas tentu akan memudahkan penulis untuk menghitung dalam bentuk rasio-rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Pada Provinsi Sumatera Barat terdapat 19 pemerintah kabupaten dan kota yang diwajibkan untuk melaporkan harus kinerja keuangan mereka dalam bentuk laporan keuangan dalam periode pelaporan. Setiap pemerintah kabupaten dan kota ini tentu memiliki kinerja keuangan yang berbeda-beda.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik ingin meneliti kinerja kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan mengacu pada aspek finansial. Pengukuran rasio keuangan pada tiap pemerintahan kabupaten dan kota untuk pengukuran kinerja keuangan yang penulis tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “**Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk Tahun 2009-2013**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran singkat pada bagian latar belakang masalah di atas yang ingin diteliti oleh penulis mengenai analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat maka penulis akan merumuskan masalah masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana rasio keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun kerja 2009-2013?
- b. Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Sumatera Barat untuk tahun 2009-2013 dengan melihat dari analisis rasio keuangan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dibatasi untuk menganalisis data keuangan yang dimulai dari tahun 2009 sampai dengan 2013 karena data ini cukup bisa diakses dan cukup untuk menggambarkan kondisi keuangan terbaru Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
- b. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio keuangan yang akan diambil dari laporan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan menggunakan komponen laporan keuangan lain yang dianggap perlu.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui berapa besar rasio keuangan pada Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk tahun kerja 2009-2013
- b. Untuk mengetahui kinerja dalam aspek keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan melihat dari analisis perbandingan rasio keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian skripsi yang penulis lakukan ini, diharapkan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pengetahuan bagi penulis tentang kinerja pengelolaan keuangan pemerintah di Sumatera Barat.
- b. Sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
- c. Sebagai referensi bagi masyarakat umum tentang kinerja keuangan Pemerintah Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah mengetahui isi proposal ini maka penulis mendeskripsikan sistematika penyajian proposal sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari uraian – uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan ini yang meliputi otonomi daerah, rasio keuangan, laporan keuangan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas dan menjelaskan mengenai populasi dan sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan mengenai perhitungan rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk kerja 2009-2013

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang peneliti lakukan dan saran dari hasil penelitian tersebut

